

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan wilayah yang selama ini terus menjadi sumber permasalahan dan konflik. Kawasan ini tidak hanya diperebutkan oleh negara-negara di Asia Tenggara saja, namun juga oleh negara tetangga lainnya. Kawasan ini diperebutkan karena merupakan wilayah perairan terluas kelima di dunia dan luasnya yang mencapai 3,5 juta km². LTS dengan memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) menjadikan kawasan LTS ini banyak diperebutkan negara-negara, menurut Lembaga Informasi Energi Amerika (*Energy Information Administration* --EIA) kekayaan terbesar di kawasan tersebut adalah adanya cadangan gas alam sebesar 900 triliun kaki kubik hal ini, juga sama dengan cadangan minyak yang dimiliki Qatar, serta adanya cadangan minyak sebanyak 28 miliar barel minyak. Selain itu juga, kawasan LTS ini merupakan rute utama perkapalan dan merupakan sumber pencarian ikan bagi banyak orang dari beberapa negara yang berada di sekitar kawasan LTS (Roza, Nainggolan, & Muhamad, 2013, hal. 4)

Konflik mengenai Laut Tiongkok Selatan berawal pada tahun 1947, ketika Tiongkok mengeluarkan peta rincian klaim kedaulatan negara. Di dalam peta tersebut menunjukkan pulau Paracel dan Spratly masuk dalam kawasan Tiongkok. Pada awalnya Tiongkok percaya bahwa mereka berhak atas pulau Spratly dan Paracel dengan mencetak peta *The Location Map of the South China Sea Islands*.

Kepercayaan ini dimulai dari 2.000 tahun yang lalu, bahwa pulau Paracel dan Spratly merupakan bagian dari dinasti sebelumnya. Namun, Vietnam menyanggah pernyataan itu karena Tiongkok tidak pernah mengklaim kedaulatan dua pulau tersebut sampai tahun 1940-an. Tidak hanya pada tahun 1947 saja Tiongkok mengeluarkan peta klaim mereka, tetapi pada tahun 1953 Tiongkok kembali mengeluarkan peta yang menunjukkan *nine-dotted line* atau *nine-dash line* di LTS, hal ini yang merupakan awal dari 9 garis putus-putus Tiongkok dimulai (Pudjiastuti & Prayoga, 2015). Selain Tiongkok, kawasan ini juga di klaim oleh Filipina, dengan mengeluarkan alasan bahwa secara geografis pulau tersebut berdekatan dengan negaranya. Selain tiga negara tersebut, ada negara lain seperti Malaysia dan Brunei yang juga ikut mengklaim kawasan LTS (BBC News, 2011).

Dalam konflik teritorial ini, Filipina merupakan pihak yang paling banyak bersuara dan aktif dalam menentang klaim oleh Tiongkok. Contohnya pada permasalahan adanya penduduk Tiongkok yang menghuni kepulauan Spratly, yang dilanjutkan dengan reklamasi pemerintah Tiongkok di pulau itu dan pemerintah Tiongkok yang melakukan pembangunan di LTS, yang mana pada saat itu masih dalam persengketaan. Filipina dengan aktif meminta pemerintah Tiongkok untuk menghentikan upaya pembangunan dan reklamasi di Kepulauan Spratly, karena reklamasi terbesar terjadi disana (Acharya, 2009, hal. 156).

Ada perbedaan manajemen atau pengelolaan konflik pada masa Aquino dan Duterte. Pada tahun 2013, Filipina mengajukan tuntutan ke pengadilan arbitrase internasional terkait konflik klaim teritorial wilayah LTS untuk menindak lanjuti

aktivitas Tiongkok di kawasan sengketa itu. Hal tersebut, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan LTS (BBC News, 2013). Pada masa kepemimpinan Benigno Aquino III, Filipina lebih cenderung untuk mendekatkan diri kepada negara sekutunya, Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan sekutu terpenting mereka dalam bidang keamanan, sehingga dianggap sebagai sekutu yang tepat untuk membuat Tiongkok terancam. Berlanjut pada tahun 2014, pemerintah Filipina meminta bantuan kepada Amerika untuk membantu meningkatkan keamanan, salah satunya melalui kerjasama pertahanan yakni *The Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA)* yang sudah ditandatangani kedua belah pihak (CNN Philippines, 2015).

Dengan perjanjian ini, Amerika Serikat membuat pangkalan militernya yang bersifat tetap di Filipina agar dapat membantu Filipina dalam mengawasi aktivitas Tiongkok di LTS sehingga memberi peluang baru bagi Filipina dalam memperkuat perannya dalam menjaga kawasan maritim. Peningkatan hubungan aliansi Amerika dan Filipina ini diharapkan juga dapat menghentikan intimidasi yang dilakukan Tiongkok terhadap Filipina dalam konflik LTS. Selain itu, adanya EDCA ini membantu meningkatkan kemampuan militer Filipina dalam menghadapi Tiongkok di LTS (CNN Philippines, 2015).

Masih di era pemerintah Aquino, pada tahun 2016 PCA (*Permanent Court of Arbitration*) telah mengeluarkan hasil gugatan Filipina yang diajukan pada tahun 2013 yang lalu. PCA menyatakan bahwa *nine dash-line* Tiongkok tidak sah di mata Hukum Internasional, dan Tiongkok tidak memiliki wewenang atas LTS. Hal ini

menandakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Tiongkok seperti eksploitasi yang dilakukan di LTS merupakan suatu pelanggaran Hukum Internasional menurut UNCLOS (Panda, 2016). Kemenangan Filipina di pengadilan arbitrase internasional ini merupakan sebuah keuntungan bagi Filipina guna menekan pihak lawan untuk menghentikan aktivitas yang telah dilakukan seperti pembangunan, konstruksi pulau serta militerisasi Tiongkok di LTS. Dengan ini, ada harapan besar untuk kepemimpinan Presiden selanjutnya untuk tetap melanjutkan kebijakan Presiden Aquino dalam menjaga keamanan maritim negara karena ini merupakan salah satu masalah utama yang harus diatasi pada pemerintahan selanjutnya (Parameswara, 2016).

Pada pertengahan tahun 2016, Filipina mengalami pergantian pemerintah dari pemerintahan Benigno Aquino III ke pemerintahan Rodrigo Duterte. Namun, pada pemerintahan Duterte kebijakan yang diterapkan mengenai LTS mengalami perubahan sikap, dari tegas menjadi lunak kepada Tiongkok dalam sengketa LTS. Filipina dan Tiongkok saat ini sudah pada tahap berencana untuk membuat suatu perjanjian dalam eksplorasi bersama LTS untuk cadangan minyak dan gas alam (Westcott, 2018).

Menurut *South China Morning Post*, memuat pernyataan Duterte terkait untuk eksplorasi bersama dengan Tiongkok di LTS. Menurut Duterte, solusi yang tepat pada sengketa ini adalah eksplorasi bersama dengan Tiongkok untuk memanfaatkan potensi yang ada di LTS. Hal ini juga untuk mengurangi potensi terjadinya perang antara kedua negara. Filipina juga tidak memprovokasikan lagi aktivitas Tiongkok di

LTS (South China Morning Post, 2018). Pada era kepemimpinan Duterte ini lebih mengarah pada cara diplomatik atau negoisasi antara kedua negara yang bersengketa. Selain itu, Filipina lebih memilih cara diplomatik untuk memberikan protes atas aktivitas Tiongkok dengan menekankan pada kepentingan nasional negara (Staff, CNN Philippines, 2018). Perbedaan ini terlihat pada masa kepemimpinan Aquino yang lebih memilih jalur hukum, hal ini berbanding terbalik dengan masa kepemimpinan Duterte yang lebih memilih jalur diplomatik dalam penyelesaian LTS dengan Tiongkok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, tulisan ini akan lebih fokus kepada perubahan kebijakan Filipina mengenai LTS yang terjadi pada era Duterte. Sehingga, pertanyaan permasalahan yang akan penulis angkat adalah mengapa kebijakan Filipina dalam sengketa LTS mengalami perubahan pada era Duterte?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor yang mendukung perubahan kebijakan Filipina dalam sengketa LTS pasca kepemimpinan Presiden Benigno Aquino III.
2. Mengetahui perkembangan hubungan Filipina dan Tiongkok dalam sengketa LTS.

1.4 Signifikansi

Perubahan kebijakan yang terjadi pada kepemimpinan Presiden Duterte ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan pada kepemimpinan Presiden Benigno

Aquino III. Penelitian ini akan dilihat melalui *Rational Choice* menurut Tom Burns & Ewa Roszkowska. Melalui konsep *Rational Choice* ini penulis akan melihat dari beberapa variabel untuk melihat faktor yang mendorong Presiden Duterte dalam mengambil kebijakan.

Secara akademik, telah banyak penelitian yang membahas mengenai bagaimana kebijakan Filipina dalam pengelolaan konflik LTS pada masa Presiden Benigno Aquino III. Namun, mengenai kebijakan Filipina dalam LTS pasca pergantian kepemimpinan Aquino ke kepemimpinan Duterte masih belum banyak ditemui. Disamping itu, secara praktik penelitian ini akan lebih berfokus pada analisis perubahan kebijakan Filipina dalam sengketa LTS yang terjadi di masa kepemimpinan Presiden Duterte dan penelitian ini sebagai pelengkap jurnal penelitian yang sudah ada sebelumnya. Terkait dengan perubahan kebijakan Filipina. Hal yang paling penting dalam penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi atau faktor yang mendorong Presiden Duterte dalam mengambil kebijakan yang berbeda dari kebijakan sebelumnya.

Dalam beberapa jurnal yang ada di kajian pustaka pada penelitian ini, secara spesifik dalam membahas faktor pendorong Presiden Duterte dalam mengambil kebijakan belum banyak dibahas. Sehingga menarik untuk dilihat khususnya pada kebijakan Filipina dalam sengketa LTS pada masa pemerintahan Duterte mengingat Filipina merupakan negara yang sangat vokal menentang klaim Tiongkok. Penulis menduga bahwa adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar serta meminimalisir konsekuensi dari kebijakan yang diambil Duterte. Dalam

mengambil keuntungan besar dalam sengketa LTS Duterte memiliki cara yang berbeda dengan mantan Presiden sebelumnya.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini, termasuk dalam studi resolusi konflik Filipina yang berfokus kepada kebijakan luar negeri terkait konflik LTS. Penulis melihat bahwa terdapat hal yang berbeda terkait pengelolaan konflik antara masa pemerintahan Benigno Aquino III dan Rodrigo Duterte. Dengan adanya perubahan tersebut, kasus ini menarik untuk dikaji. Penulis melihat, kebijakan Duterte ini bertolak belakang dengan kebijakan sebelumnya dan dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui terkait faktor yang mendorong Presiden Duterte untuk mengambil kebijakan yang dinilai tidak tepat bagi masyarakat Filipina. Meskipun, kebijakan ini banyak menuai protes dari masyarakat Filipina tetapi Presiden Duterte enggan untuk merubah kebijakannya tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis memiliki batasan priode penelitian pada masa kepemimpinan Duterte hingga Juli 2018. Hal ini dikarenakan penulis dalam membatasi penelitian ini hingga waktu yang ditentukan penulis, kasus ini masih terus berjalan. Sehingga, penulis membatasinya agar cakupan tidak terlalu luas dan lebih fokus.

1.6 Kajian Pustaka

Terdapat banyak artikel-artikel yang membahas mengenai sengketa LTS, termasuk sengketa LTS antara Tiongkok dan Filipina. Dalam artikel jurnal Nguyen-Dang Thang dan Nguyen Hong Thao yang berjudul '*China's Nine Dotted Lines in the South China Sea: The 2011 Exchange of Diplomatic Notes Between the Philippines*

and China', jurnal ini menjelaskan tentang klaim Tiongkok atas *nine dash-line* dan awal mulai klaim tersebut diciptakan di LTS dan juga adanya penjelasan klaim terhadap kepulauan Spratly yang diperebutkan oleh Tiongkok dan Filipina. Kemudian, jurnal ini juga menjelaskan mengenai klaim Filipina terhadap kepulauan Spratly bahwa secara geografis berada dalam ZEE Filipina dan juga, menjelaskan bahwa Filipina menentang *nine dash-line* yang dikeluarkan Tiongkok di LTS. Filipina meminta Tiongkok untuk mengeluarkan bukti atau kebenaran *nine dash-line* tersebut. Dalam jurnal ini juga lebih menekankan mengenai pertukaran argumen masing-masing negara dalam menentang klaim satu sama lain di LTS (Thang & Thao, 2012, hal. 36-46)

Hal yang sama seperti jurnal yang berjudul '*Philippines-China Relations: The Case of the South China Sea (Spratly Island) Claim's*', ditulis oleh Mark Anthony M. Velasco, dalam jurnal ini membahas mengenai hubungan Tiongkok dan Filipina dalam sengketa LTS terutama pada klaim pulau Spratly. Sebelumnya, Velasco menjelaskan potensi yang ada LTS dan juga menjelaskan posisi negara-negara yang ikut mengklaim bagian yang ada wilayah sengketa. Selain itu, terdapat juga sub-bab jurnal ini yang membahas mengenai perkembangan sengketa klaim kepulauan Spratly pada masa kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos. Dalam penjelasan yang ada di dalam jurnal ini lebih membahas mengenai hubungan diplomatik kedua negara yang tidak terganggu atas masalah sengketa yang ada di LTS, karena kedua negara ini juga saling membutuhkan pada beberapa sektor. Seperti, pada sektor ekonomi dimana Filipina melihat Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki peluang besar

untuk memajukan perekonomian Filipina. Sebaliknya, Tiongkok melihat Filipina merupakan salah satu pasar besar yang ada di Asia Tenggara yang dinilai juga bisa menguntungkan Tiongkok, dalam menjadikan perekonomian Tiongkok yang lebih maju lagi (Velaso, 2014, hal. 78-84).

Dalam jurnal yang berjudul '*The Sino-Philippine South China Sea Dispute*', ditulis oleh Shelton Woods ini menjelaskan mengenai sejarah hubungan Filipina dan Tiongkok, didalam jurnal ini juga sedikit menjelaskan sejarah Filipina perdagangan dengan Tiongkok. Kemudian, Woods juga menyebutkan beberapa argumen Filipina mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tiongkok di LTS yang dianggap tidak sesuai dengan UNCLOS. Selain itu juga, jurnal ini menjelaskan posisi ASEAN sebagai organisasi kawasan Asia Tenggara yang dinilai tidak terlalu ikut campur dalam masalah kedua negara tersebut dan negara-negara ASEAN yang lain seperti Myanmar, Laos dan Thailand yang juga tidak mau ikut campur dalam sengketa LTS. Dalam jurnal ini Woods lebih menekankan dalam penjelasan sejarah hubungan Filipina dan Tiongkok serta, hubungan kedua negara pada masa Presiden Aquino (Woods, 2016, hal. 159-170).

Dalam jurnal George K.Ndi berjudul '*Philippines v China: Assessing the implications of the South China Sea Arbitration*', menjelaskan mengenai sejarah awal klaim Tiongkok terkait *nine dash-line* yang dikeluarkan pada tahun 1935 dan diajukan ke PBB pada tahun 2009 untuk memperkuat klaim di LTS. Kemudian, dengan adanya klaim Tiongkok ini lah yang merupakan awal dari sengketa LTS ini di mulai. Munculnya berbagai klaim negara yang berada di LTS ini membuat masalah

ini belum menemukan titik temu. Pada akhirnya 2013, Filipina membawa kasus ini ke pengadilan arbitrase internasional untuk mengetahui apakah *nine dash-line* milik Tiongkok itu sesuai di mata Hukum Internasional. Pada hasil keputusan pengadilan ini menyatakan bahwa *nine dash-line* melanggar hukum dan tidak valid menurut UNCLOS. Keputusan pengadilan ini mendapatkan protes dari Tiongkok, karena mereka menganggap pengadilan tersebut tidak memiliki yurisdiksi. Dengan hasil yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Internasional, Tiongkok enggan untuk mengikuti atau mematuhi aturan yang ada. Dalam jurnal ini lebih menekankan pada penjelasan mengenai tindakan yang dilakukan Filipina untuk memperjuangkan hak mereka dalam LTS dengan membawa kasus ini ke pengadilan arbitrase internasional (Ndi, 2016, hal. 1-15).

Kemudian, Hong Zhao menulis jurnal dengan judul '*Sino-Philippine Relations: Moving Beyond South China Sea Dispute*', membahas mengenai hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Filipina pada masa kepemimpinan Marcos dan pada kepemimpinan Arroyo. Pembahasan yang dijelaskan di dalam jurnal ini juga mengenai perkembangan sengketa LTS pada awal kepemimpinan Marcos hingga Arroyo, dan juga sedikit membahas mengenai LTS pada kepemimpinan Aquino. Selain itu, ada satu sub-bab didalam jurnal ini yang membahas mengenai hubungan Tiongkok dan Filipina dalam bidang ekonomi serta, sedikit membahas dilema yang dialami Filipina dalam kebijakan luar negeri (Zao, 2014, hal. 57-76).

Selain itu, didalam jurnal '*Pengaruh Kepemimpinan Presiden Duterte Terhadap Hubungan Bilateral Filipina dengan Cina*' ditulis oleh Bayu Arihito. Dalam jurnal ini, Arihito mencoba menjelaskan mengenai sejarah hubungan Filipina dan Tiongkok pada awal masa kolonial hingga pada masa pemerintahan Duterte. Kemudian, penulis mulai membahas mengenai pengaruh Duterte dalam hubungan Bilateral Filipina dan Tiongkok dengan melihat dari berbagai sisi seperti Kepribadian, Nilai, Pengalaman, dan Bakat. Jurnal ini juga, menjelaskan bagaimana perkembangan hubungan Filipina dan Tiongkok pada masa ke masa hingga pada kepemimpinan Duterte dengan melihat dari segi perkembangan kerjasama pada bidang ekonomi dan investasi. Serta, menjelaskan mengenai pengurangan potensi konflik antar kedua negara (Arihito, 2017, hal. 2-14).

Perbedaan dari jurnal yang di tulis oleh Bayu Arihito yakni, tulisan ini lebih menekankan kepada pembahasan mengenai kepribadian Presiden Duterte yang mempengaruhi keseluruhan kebijakan Filipina dalam hubungan dengan Tiongkok. Sedangkan pada peneliatin ini tidak terlalu mendalam membahas mengenai kepribadian Presiden Duterte dan penelitain ini hanya membahas mengenai analisis kebijakan Presiden Duterte dalam melakukan kerja sama untuk mengelola SDA di LTS dengan Tiongkok

Dalam jurnal '*Sino-Philippine Joint Development in the South China Sea: Is Political Will Enough?*', ditulis oleh Carlos Santamaria. Jurnal ini membahas mengenai kebijakan Duterte yang merangkul Tiongkok untuk eksplorasi bersama dan membahas mengenai kegagalan *Joint Maritime Seismic Undertaking* (JMSU) yang

merupakan perjanjian untuk melakukan pengelolaan potensi yang ada di LTS antara Tiongkok, Filipina dan Vietnam pada tahun 2005-2008. Santamaria juga menambahkan beberapa saran atau rekomendasi untuk pemerintahan Filipina dalam melakukan kerjasama di LTS bersama Tiongkok, agar tidak mengalami kegagalan seperti JMSU (Santamaria, 2018, hal. 2-17).

Perbedaan dengan penelitian ini yakni, pada jurnal yang ditulis oleh Calso Santamaria lebih menekankan mengenai kegagalan JMSU serta, lebih membahas mengenai saran-saran yang harus dilakukan Presiden Duterte ketika ingin melakukan kerjasama untuk mengelola LTS bersama Tiongkok agar kerja sama tersebut tidak gagal seperti kerja sama JMSU. Sedangkan, pada penelitian ini lebih cenderung membahas mengenai faktor pendorong Presiden Duterte untuk melakukan kerja sama bersama Tiongkok di LTS.

Beberapa jurnal diatas, memperlihatkan bagaimana analisis permasalahan hubungan Filipina dan Tiongkok dalam LTS. Serta, bagaimana sejarah hubungan Filipina dan Tiongkok sebelum masa kepemimpinan Presiden Duterte. Dengan itu ini menjadi sangat membantu bagi penulis dalam mengembangkan penelitian.

1.7 Landasan Teori atau Kerangka Konsep

Rational Choice

Landasan yang digunakan pada penelitian ini adalah *Rational Choice*. Dalam pemahaman teori *Rational Choice* ini, banyak yang telah menyumbangkan pemahamannya pada teori ini, oleh sebab itu penulis akan lebih fokus terhadap karya

Tom Burns dan Ewa Roszkowska. Dalam jurnalnya '*Rational Choice Theory: Toward a Psychological, Social, and Material Contextualization of Human Choice Behavior*', Burns dan Roszkowska mencoba untuk meluaskan pemikiran mereka mengenai teori pilihan rasional, menurut mereka pilihan rasional merupakan teori yang berfokus pada determinan pilihan individu dan metode penggabungan dengan perilaku yang didasari pada keputusan aktor individu. Sebenarnya, teori ini biasanya dipakaidalam model ekonomi yang biasa disebut *Homo Oeconomicus* yang artinya mereka merupakan orang yang rasional dan cenderung lebih mementingkan diri sendiri (Burns & Roszkowska, 2016, hal. 196).

Dalam teori pilihan rasional ini juga digunakan untuk menemukan cara yang dianggap terbaik untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, dan teori ini juga lebih spesifik dalam menghadapi situasi dalam mengambil keputusan seorang aktor dengan mempertimbangkan beberapa cara alternatif yang dianggap minim konsekuensi. Teori ini juga berpandangan bahwa aktor sudah mengetahui semua alternatif serta konsekuensi yang bakal didapat dan juga memikirkan hasilnya di masa depan. (Burns & Roszkowska, 2016, hal. 196).

Selain itu, teori ini juga lebih menekankan sifat yang ada di aktor tersebut dan kemampuan dalam membuat keputusan dengan memperhitungkan *cost and benefit* (Burns & Roszkowska, 2016, hal. 197). Burns dan Roszkowska menyebutkan beberapa varian asumsi yang ada di dalam teori pilihan rasional, yakni;

- 1) Aktor atau agen yang lebih kolektif dalam situasi pengambilan keputusan yang mengidentifikasi atau menentukan tindakan atau urutan tindakan alternatif. Serta, daftar pilihannya dalam situasi keputusan sudah diurutkan.
- 2) Aktor sudah mengetahui semua konsekuensi yang dihasilkan dari alternatif-alternatif yang sudah ada, seperti mengetahui hasil atau imbalan dari cara alternatif yang dipilih.
- 3) Aktor sudah memiliki preferensi diantara opsi preferensi yang ada, dengan memilih preferensi yang paling konsisten. Dalam varian ketiga ini juga mengasumsikan bahwa konsekuensi juga dapat dibandingkan dengan preferensi yang lain atau utilitas subjektif.
- 4) Aktor menerapkan prosedur keputusan atau memilih cara yang dianggap paling alternatif untuk memaksimalkan keuntungan bersih dari tindakan tersebut (Burns & Roszkowska, 2016).

Teori *Rational Choice*, dimotivasi oleh kepentingan dari diri aktor itu sendiri yang sudah mengidentifikasi konsekuensi tersebut. Aktor juga menilai atau telah membedakan *cost and benefit* dari tindakan alternatif atau hasil yang akan mereka dapatkan. Selain itu, aktor juga menggunakan tahapan-tahapan untuk memperoleh keputusan yang akan mereka ambil dengan memaksimalkan atau mengoptimalkan utilitas (Burns & Roszkowska, 2016, hal. 199).

Pada teori ini memiliki sembilan variabel yaitu *context, actor, principle of action, motivation and values, sacrality or deep values and morality, norms, institutions, cognitive framework, cognitive-evaluative capabilities* (Burns & Roszkowska, 2016, hal. 204). Tetapi, pada penelitian ini penulis hanya mengambil

lima variabel yaitu *context*, *principle of action*, *motivation and values*, *cognitive framework*, dan *cognitive-evaluative capabilities*. hal ini dikarenakan kelima variable tersebut sudah mencakup kesembilan variabel. Pada variabel *motivation and values*, *norms* dan *sacrality or deep values and morality* memiliki maksud yang sama. Pada pembahasan variable *institutions*, penulis menggabungkan di variabel *cognitive framework*.

Teori *Rational Choice*, akan digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara hal yang melatarbelakangi perubahan kebijakan Filipina dalam sengketa LTS pada masa kepemimpinan Duterte. Teori ini, sangat erat kaitannya dengan latar belakang Duterte dalam mengeluarkan kebijakan yang berbeda pada masa pemerintahan sebelumnya. Perbedaan yang dialami pada pemerintahan yang baru ini membuat banyak pertanyaan-pertanyaan publik terkait kebijakan Filipina dalam sengketa LTS yang mengalami perubahan pasca Presiden Aquino. Kebijakan yang sebelumnya lebih tegas tetapi berubah menjadi kebijakan diplomatik yakni, pada kepemimpinan Duterte lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa LTS dengan cara diplomatik, damai dan memilih untuk mengelola potensi di LTS secara bersama dengan Tiongkok.

Jika dilihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Filipina saat ini melalui teori *Rational Choice* ini, tentu Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina merupakan aktor disini yang mengubah sebuah kebijakan Filipina dalam sengketa LTS. Kebijakan Filipina yang sebelumnya diketahui lebih agresif dalam menangani

kasus LTS tetapi pada masa kepemimpinan Duterte terlihat lebih santai dalam menanggapi. Dalam penulisan penelitian ini, menggunakan teori *Rational Choice* agar bisa lebih banyak mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi Presiden Duterte dalam membuat kebijakan luar negeri.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif juga, mengkonstruksi realitas dan memahami makna. Penelitian kualitatif ini juga memperhatikan proses peristiwa. Metode penelitian kualitatif menggunakan logika yaitu, teori dan hipotesa diuji logika sebab dan akibat. Desain kualitatif yang bersifat statis digunakan melalui adanya penetapan konsep, variabel penelitian serta hipotesis. Metode penelitian kualitatif ini juga lebih mengutamakan penggunaan logika induktif dengan kategorisasi yang diciptakan dari penemuan penelitian dengan informasi di lapangan atau bisa juga dengan data-data yang ditemukan (Somantri, 2005, hal. 2)

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah aktor yang melakukan perubahan kebijakan Filipina dalam LTS. Rodrigo Duterte menjadi subjek selain dikarenakan menjadi aktor utama dari perubahan kebijakan Filipina tersebut, namun juga menjadi hal yang ingin diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

1.8.3 Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan pengumpulan data terkait perubahan kebijakan Presiden Duterte, teknik yang digunakan adalah dengan melakukan studi literatur dengan cara menelusuri berbagai dokumen-dokumen tertulis seperti, Buku, Jurnal, dan artikel-artikel yang ada di internet. Dalam mencari artikel terkait studi kasus ini, yaitu dengan cara mengambil data dari website resmi guna menambah bukti serta memperkuat argumen pada penelitian ini. Penelitian ini sendiri akan mengambil dari beberapa sumber literatur seperti buku, jurnal, dan penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang akan digunakan adalah data yang berasal dari laman resmi pemerintahan seperti data dari laman Filipina. Data sekunder yang akan digunakan ialah tulisan-tulisan akademik dan buku-buku pendukung yang terkait dengan penelitian ini serta sumber-sumber dari media-media Internasional.

1.8.4 Proses Penelitian

Metode selanjutnya analisis data dari data yang didapat. Teknik dalam mengelola data yang sudah didapatkan akan di analisis dengan beberapa tahapan yaitu dengan melakukan kajian studi kasus dengan data yang sudah ditemukan. Hal itu dilakukan guna memperdalam materi yang dilakukan dengan cara membaca isi masing-masing sumber agar bisa menemukan gagasan. Setelah itu tahap selanjutnya adalah pencatatan hasil kajian dan hasil bacaan agar gagasan yang muncul tersebut dapat disimpan.

Tahap selanjutnya adalah pembagian materi-materi hasil kajian yang berdasarkan catatan dengan membagi menjadi beberapa sub-bab yang akan menjadi bagian dari pembahasan terkait penelitian berdasarkan metode dari buku penelitian (Creswell, 2014, hal. 3). Selanjutnya adalah penjelasan dengan melakukan deskripsi dari hasil pembagian dari sub-bab terkait. Dan dalam langkah terakhir adalah hasil pemikiran atau interpretasi dari temuan dan deskripsi yang terkait yang akan membuat sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.